

DAFTAR REFERENSI

- Indonesia. Direkur Jendral Pajak (1986). *SE-27/PJ.22/1986 tentang biaya entertainment dan sejenisnya (seri PPh umum 18)*. 14 Juni 1986.
<http://www.org/ortax/?mod=aturan&q=&hlm=440&page=show&id=2073>
- Indonesia. Direktorat Jendral Pajak (2002). *KEP-220/Pj./2002 tentang perlakuan pajak penghasilan atas biaya pemakain telpon seluler dan kendaraan perusahaan*. 18 April 2002. <http://www.kanwilpajakhusus.depkeu.go.id/penyuluhan/pph/biayaHPdankendaraan.htm>
- Indonesia. Menteri Keuangan (2003). *236/KMK.03/2003 tentang perubahn kedua keputusan menteri keuangan nomor 254/KMK/.03/2001 tentang penunjukan pemungut pajak penghasilan pasal 22, sifat dan besarnya pungutan serta tata cara penyetoran dan pelaporannya*. 3 Juni 2003.
<http://www.ortax.org/ortax/?mod=aturan&page=show&id=391>
- Indonesia. Direktur Jendral Pajak (2002). *192/PJ./2002 tentang tata cara penerbitan surat keterangan bebas (SKB) pemotongan/pemungutan pajak penghasilan*. 15 April 2002. <http://www.dannydarussalam.com/engine/peraturan/view.php?id=6871>
- Indonesia. Menteri Keuangan (2002). *138/KMK.03/2002 tentang perubahan atas keputusan menteri keuangan nomor 520/KMK.04/2000 tentang jenis-jenis harta yang termasuk dalam kelompok harta berwujud bukan bangunan untuk keperluan penyusutan*. 8 April 2002.
<http://www.kanwilpajakhusus.depkeu.go.id/penyuluhan/pph/golharta/htm>
- Muqodim. (1999). *Perpajakan*. Yogyakarta: UII Pres
- Rusjdi, Mohammad. (2002). *Ketentuan umum dan tata cara perpajakan*. Surabaya.
- Rusjdi, Mohammad. (2002). *Pajak penghasilan*. Surabaya.
- Soemarso.(2007). *Perpajakan*. Jakarta. Salemba Empat
- Undang-undang No.17 tahun 2000 tentang perubahan ketiga pajak atas Undang-Undang No.7 tahun 1983 tentang pajak penghasilan*. Jakarta: Depatemen Keuangan Republik Indonesia.